

BAB III
PELAKSANAAN TANAH MILIK BAPAK SUADA UNTUK BANGUNAN
SEKOLAH DASAR BUDI MULYA DI DESA PADA ASIH KECAMATAN
CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT YANG DI KUASAI
PEMERINTAH DAERAH MENURUT ASAS *RESTITUTIO IN INTEGRUM*

A. Sejarah Tanah Milik Bapak Suada di Desa Pada Asih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Desa Pada Asih Kecamatan Cisarua merupakan desa yang berada kaki bukit Gunung Burangrang yang termasuk di daerah kawasan Bandung Utara (KBU) dimana mata pencaharian penduduknya dari dulu hingga sekarang mayoritas bercocok tanam, adapun perbedaannya kalau dulu bercocok tanam dilakukan dengan peralatan yang sangat sederhana sekali belum ada peralatan yang modern seperti sekarang, jadi kadang-kadang masyarakatnya bercocok tanam hanya menghasilkan apa-apa saja yang tumbuh secara alami dari tanah pegunungan sedangkan mulai tahun 1900 sampai sekarang sudah bisa bercocok tanam dengan menanamnya sendiri dan hasilnya bisa dijual dan dapat menghasilkan penghasilan untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri.

Sumber lain menerangkan mulai dari tahun 1945 setelah Republik Indonesia Merdeka Penduduk Desa Pada Asih selain bercocok tanam atau bertani ada juga yang sudah mulai beternak hewan peliharaan seperti sapi, domba, kerbau, ayam dan lain-lain. Data lain menerangkan bahwa, Desa Pada Asih dahulu bernama Cipanas berasal dari kata Ci artinya Air, sedangkan

Panas artinya dahulu ada sumber mata air panas konon dari gunung tangkuban perahu, sejak sekitar tahun 1983 Desa Cipanas berganti nama menjadi Desa Pada Asih karena sering terjadi perselisihan antar warga petani pemakai air maka terjadilah musyawarah sesepuh Desa dan disepakati untuk mengusulkan bernama Desa Cipanas menjadi Desa Pada Asih yang asal kata Pada artinya saling sedangkan Asih artinya menyayangi, jadi Pada Asih artinya saling menyayangi dan hingga sekarang tetap bernama Desa Pada asih.

Catatan sejarah Desa Pada Asih semenjak masa Jabatan sesepuh Kampung yang bernama Eyang Armah yang merupakan orang pertama yang menjadi sesepuh Desa Pada Asih yaitu pada tahun 1867 yang dipercaya oleh semua orang menjadi petinggi Desa ini sehingga disahkan menjadi Kepala Kampung atau sebutan lain Lurah. Sesepuh masyarakat Padaasih Eyang Armah sangat peka terhadap keadaan yang sangat memprihatinkan pada saat itu, setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dinobatkan menjadi Kepala Desa sesepuh kampung Eyang Armah secara bertahap membangun tatanan pemerintahan meskipun secara sederhana guna mensejahterakan masyarakatnya pada saat itu, yang mayoritas hanya mengandalkan dari hasil bumi itu sendiri. Daerah Pada Asih merupakan daerah yang subur untuk bercocok tanam sehingga selain penduduk asli lambat laun daerah ini juga disatroni atau didatangi oleh penduduk dari luar desa yang berkeinginan ikut bercocok tanam di kawasan ini, sehingga lambat laun kehidupan sosial budaya sudah mulai agak komplek.

Hak milik adalah hak yang dikatakan merupakan hak yang turun temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah dihapuskan dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain⁴², terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, misalnya pemegang hak milik dapat menyewakan kepada orang lain, selama dibatas oleh penguasa, maka wewenang dari pemegang hak milik tidak terbatas⁴³, selain bersifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Mengenai sejarah kepemilikan tanah yang kini dibangun sekolah dasar budi mulya di desa pada asih kecamatan cisarua kabupaten bandung barat, bapak suada mengaku mendapatkan tanah tersebut dengan membelinya dari seorang yang bernama nyi mimi, bapak suada membeli tanah tersebut pada tahun 1970 tanggal 03 desember 1970, yang terletak di kampung Pamoyanan dimana desa terdahulu yaitu desa Cipanas Kecamatan Cisarua yang sekarang menjadi desa pada asih kecamatan cisarua, dan dahulu pemerintah Kabupaten DT II Bandung dan sekarang telah menjadi pemisahan menjadi pemerintahan kabupaten Bandung Barat, dan dengan tercatat dalam buku C Desa Nomor Kohir 511 persil 77 D.II Blok Pamulang dengan luas 1200 meter persegi,

⁴² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya*, cetakan ke 4, Jakarta, Sinar Grafik, 2010, hlm. 60

⁴³ *Ibid*, hlm. 61

dengan tanda bukti tersebut bahwa sahnyalah tanah tersebut dapat dikatakan adalah tanah yang memiliki sertifikat tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang sah dimata hukum.

Setelah mencapai kesepakatan dengan penjual yaitu nyi mimi sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak untuk menjual dan membeli tanah tersebut maka tanggal 30 desember tahun 1970 tanah tersebut telah menjadi milik bapak suada dengan bukti atas peralihan dan akta jual beli No. 59 tahun 1970, dan kemudian tanah tersebut digunakan bapak suada untuk menanam tanaman seperti singkong, cabai, dan pohon durian, dimana jika berbuah dan panen singkong hasilnya selalu dipakai atau dimasak atau digunakan sendiri sebagai pangan dan apabila ada yang berminat maka panen tersebut di jual sehingga dapat menghasilkan tambahan penghasilan bapak suada mengingat bapak suada adalah seorang kepala keluarga dari ke empat anaknya, dan mempunyai sorang istri, di samping itu bapak suada adalah seorang pekerja buruh harian lepas.

Mengenai tanah hak milik yang kini di miliki bapak suada hak atas tanah tersebut dapat dikatakan adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah, ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Namun saat ini tanah yang dimiliki bapak

suada tersebut telah di bangun bangunan di atasnya sekolah dasar Budi Mulya, berdirinya bangunan atau gedung sekolah dasar budi mulya tersebut beraal dari bapak suada didatangi oleh orang pemerintahan dari kantor desa hingga terjadi komunikasi pembicaraan secara lisan yang memohon izin memakai tanah milik bapak suada tersebut, dengan dijanjikan bahwa akan diberikan kompensasi anak bapak suada akan menjdi atau dijadikan pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah tersebut, dan pada tahun 1984 telah didirikan gedung sekolah dasar negeri tersebut dan beridir hingga kini, lalu bapak suada mencoba melakukan upaya penagihan kepada pihak kantor desa yang telah menjanjikan bahwa anaknya akan dijaikan sorang pegawai negeri sipil namun karena tidak kunjung terwujud janji tersebut maka bapak suada menagih.

Namun sama sekali tidak ada tanggapan dari pihak kantor desa atau bahkan dari orang yang telah datang ke tempat bapak suada yang meminta izin untuk mendirikan bangunan sekolah dasar budi mulya tersebut, selain itu tidak adanya ganti rugi atau tor desa kepada bapak suada selaku pemilik tanah seluas 1200 meter persegi yang kini di atasnya di bangun sekolah dasar budi mulya, karena itu dalam hal ini adanya unsur penguasaan atas tanah milik bapak suada, mengenai hal tersebut ada 2 (dua) jenis pngertian mengenai penguasaan dan menguasai, keuda hal tersebut tentulah berbeda, Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti

yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik⁴⁴ Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain.

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di hakinya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Mengenai penguasaan tanah juga memiliki peraturan yaitu hak penguasaan atas tanah yang mempunyai wewenang, hak penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan yang bersifat umum (hak perorangan atas tanah) yaitu, hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya.

Hak atas tanah tersebut terdiri dari:

1. Hak Atas Tanah Orisinal Atau Primer

Yaitu, hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya seperti:

a. Hak milik

⁴⁴ Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm.23

Hak milik adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang pokok agraria yang berbunyi sebagai berikut: "Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah", dengan mengingat ketentuan Pasal 6 undang-undang pokok agraria. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak milik adalah hak atas tanah, karena itu tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi dan yang ada dibawah atau didalamnya.

Subyek hak milik yang dapat mempunyai tanah hak milik menurut undang-undang pokok agraria dan peraturan pelaksanaanya, adalah:

1) Perseorangan

Warga Negara Indonesia (WNI), baik pria maupun wanita, tidak berwarganegaraan rangkap (Pasal 9, 20 ayat (1) undang-undang pokok agrarian);

2) Badan-badan Hukum Tertentu

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara, koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial (Pasal 21 ayat (2) undang-undang pokok agraria).

⁴⁵ A.P Perlindungan, *Op.Cit*, hlm.124

Terjadinya Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagai mana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-undang pokok agraria, yaitu:

- 1) Hak milik atas tanah yang terjadi Menurut Hukum Adat;
- 2) Hak Milik Atas tanah tertajdi karena Penetapan Pemerintah;
- 3) Hak Milik atas tanah terjadi karena Undang-undang.

Adapun ciri-ciri dan sifat hak milik yaitu:

- 1) Tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah;
- 2) Dapat diwariskan;
- 3) Dapat dialihkan dengan cara seperti jual beli, hibah, tukar menukar, lelang dan penyertaan modal;
- 4) Turun temurun;
- 5) Dapat dilepaskan untuk kepentingan sosial;
- 6) Dapat dijadikan induk hak lain;
- 7) Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

Hapusnya hak milik diatur didalam Pasal 27 Undang-undang pokok agraria yang menetapkan faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Milik atas tanah, bila:

- 1) Tanahnya jatuh kepada Negara, contohnya;
- 2) Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18 Undang-undang pokok agrarian;
- 3) Dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya;

- 4) Dicabut untuk kepentingan umum;
- 5) Tanahnya diterlantarkan;
- 6) Karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai sunyek hak milik atas tanah;
- 7) Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik atas tanah;
- 8) Tanahnya mustas contohnya jika terjadi bencana alam.

b. Hak Guna Usaha

Ketentuan umum hak guna usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, 28-34, 50 ayat (2) Undang-undang pokok agraria, Pasal 2-18 Peraturan Pemerintah No. 40/1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Pengertian hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna kegiatan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan (lihat Pasal 28 ayat (1), Peraturan Pemerintah No.40/1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai).

Subyek hak guna usaha, yang dapat mempunyai hak guna usaha menurut Pasal 30 Undang-undang pokok agraria Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 40/1996, adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia.

- 2) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Asal dan terjadinya hak guna usaha adalah tanah Negara, kalau asal tanah hak guna usaha berupa tanah hak, maka tanah hak tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang hak hak guna usaha. Terjadinya hak guna usaha dapat melalui penetapan pemerintah (pemberian hak) dan ketentuan Undang-undang (ketentuan konversi hak *erpacht*).

c. Hak Pakai

Hak Pakai (HP) diatur dalam Pasal 16 ayat 9) huruf d, 41, 43, 50 ayat (2) Undang-undang pokok agraria dan Pasal 39 s/d 58 PP No. 40/1996 tentang hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai.

Pengertian hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah (Pasal 41 (1) Undang-undang pokok agraria).

Subyek hak pakai (Pasal 42 Undang-undang pokok agraria dan Pasal 39 Peraturan pemerintah No. 40/1996 tentang hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai.

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah;
- d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
- e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 41/1996);
- f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
- g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Asal atau obyek hak pakai berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) PP No. 40/1996:

- 1) Tanah Negara;
- 2) Tanah Hak Pengelolaan;
- 3) Tanah Hak Milik

Hak Pakai dapat terjadi karena:

- a) Penetapan Pemerintah (tanah negara dan tanah hak pengelolaan);
- b) Perjanjian pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah;
- c) Undang-undang, ketentuan tentang Konversi.

Jangka waktu hak pakai. Jangka waktu hak pakai berbeda sesuai dengan asal tanahnya, (Pasal 45-49 Peraturan Pemerintah No. 40/1996):

- 1) Hak pakai atas tanah negara dan tanah hak Pengelolaan berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Khusus hak pakai yang dipunyai oleh Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

- 2) Hak pakai atas tanah hak milik berjangka waktu paling lama 25 tahun, tidak ada perpanjangan waktu. Namun, atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak pakai dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat pembuat akta tanah dan wajib didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

3) Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan adalah hak atas tanah yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk:

- a) Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanahnya;
- b) Menggunakan tanah untuk keperluan sendiri;
- c) Menyerahkan bagian dari tanahnya kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang telah ditentukan bagi pemegang hak tersebut yang meliputi segi peruntukan, penggunaan, segi jangka waktu dan segi keuangannya.

Sifat dan ciri hak pengelolaan yaitu:

1. Tergolong hak yang wajib didaftarkan;
2. Tidak dapat dipindahtangankan;
3. Tidak dapat dijadikan jaminan hutang;
4. Mempunyai segi-segi perdata dan segi-segi public;

Subyek Hukum Hak Pengelolaan yaitu:

- a. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia.
- b. Lembaga dan Instansi Pemerintahan.

2. Hak Atas Tanah Derivatif atau Sekunder

Yaitu, hak atas tanah yang tidak langsung bersumber kepada Hak Bangsa Indonesia dan diberikan kepada pemilik tanah dengan cara memperolehnya melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang bersangkutan,⁴⁶ seperti:

1. Hak guna Bangunan;
2. Hak Pakai;
3. Hak Sewa;
4. Hak Usaha Bagi Hasil;
5. Hak Gadai;
6. Hak Menumpang.

⁴⁶Arie S Hutagalung, *Asas-asas Hukum Agraria*, Jakarta, UI Perss, 2001, hlm.27

B. Sekolah dasar negeri budi mulya di kabupaten bandung barat desa pada asih kecamatan cisarua yang berdiri di tanah milik bapak suada

Sekolah dasar negeri budi mulya terletak di jalan Pamoyanan No.80 RT.01 RW.14, desa Pada asih, Kecamatan, cisarua, Kabupaten, Bandung Barat, Propinsi, Jawa Barat, sekolah tersebut adalah sekolah yang didirikan pada tahun 1984, bapak. Jajang targanda adalah kepala sekolah yang menjabat saat ini di sekolah tersebut, sekolah yang hingga kini aktif, melakukan kegiatan pembelajaran untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah tersebut berstatuskan sekolah negeri.

Menurut bapak suada sekolah tersebut berdiri di atas tanah miliknya yang memiliki luas kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) meter persegi, yang bahkan tidak ada penggantian kerugian terhadap tanah miliknya, di tahun 1984 sebelum bangunan sekolah dasar tersebut berdiri memang sempat ada seseorang meminta izin untuk mendirikan bangunan sekolah dasar yang akan didirikan untuk kepentingan bersama, dari informasi yang dihimpun, tanah seluas 1200 (seribu dua ratus) meter persegi tersebut sudah menjadi objek hukum sejak, bapak suada selaku pemilik tanah menagih janji dan bahkan meminta ganti kerugian atas tanah tersebut.

Saat masih dalam proses sengketa, pihak kantor kecamatan yang mewakili pemerintah daerah, yang mendirikan bangunan sekolah pada tahun 1984, tidak pernah sekalipun melakukan mediasi atau bernegosiasi dengan pihak bapak suada, bahkan ketika bapak suada menagih janji dan meminta

ganti kerugian tidak ada upaya apapun yang di lakukan pihak kantor kecamatan, menurut bapak suada yang di katakan oleh pihak kecamatan hanyalah pernyataan yang tidak pasti.

Bahwa pihak kantor kecamatan tersebut akan mengganti kerugian kepada bapak suada, namun seiring dengan berjalannya waktu pihak kantor kecamatan tersebut malah mengeluarkan surat tanda hibah atas nama bapak suada yang telah ditandatangani oleh bapak suada, tetapi bapak suada mengaku bahwa ia tidak pernah membuat pernyataan hibah maupun surat hibah kepada siapapun terutama pihak kantor kecamatan.

Dalam hal ini telah jelas adanya penguasaan lahan tanah hak milik perorangan oleh pemerintah daerah kabupaten bandung barat, Berdasar Pasal 2 Undang-undang pokok agraria dengan penjelasannya penguasaan tersebut, menurut konsep undang-undang pokok agraria, pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti hal tersebut diatas⁴⁷ artinya dalam konsep menguasai Negara atas tanah tersebut semata-mata untuk mengatur dan bukan memiliki tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang “bersifat pribadi”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-undang pokok agraria :

”tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak

⁴⁷ Budi Harsono, *Op.Cit*, hlm.234

atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

Wewenang Negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang termasuk masyarakat hukum dengan tanah terkait erat hubungan hukum antara tanah dengan negara. Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapapun. Oleh Karena itu, sangat tidak tepat jika melihat hubungan Negara dengan tanah terlepas dengan hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah ulayatnya dan hubungan antara perorangan dengan tanahnya, ketiga hubungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, dan merupakan hubungan yang bersifat “tritunggal”.⁴⁸

C. Data sekolah budi mulya desa pada asih kabupaten bandung barat tahun 2017

1. Siswa di sdn budi mulya

Tingkat	Jumlah
1	47
2	53
3	41
4	40
5	42

⁴⁸ *Ibid*, hlm.7

6	38
Total	261

Di tahun 2017 ada sekitar 310 pendaftar yang mendaftarkan diri untuk bersekolah di sdn budi mulya haya pihak sekolah menerima siswa sebanyak 261 dan sebagian tidak dapat di terima karena berbagai alasan.

Di antaranya pada kelas atau tingkat 1 ada sekitar 47 murid , di sdn budi mulya hanya ada 2 kelas tingkat 1, yaitu kelas A dan kelas B di tiap-tiap kelas ada 23 dan 24 murid

2. Siswa Mengulang

Tingkat	Jumlah
1	0
2	3
3	2
4	0
5	0
6	0
Total	5

Sedangkan bagan di atas menjelaskan tetang jumlah siswa yang mengulang kembali atau tidak naik kelas pada tahun 2017. Di antaranya :

Kelas atau tingkat 2 : ada 3 orang siswa yang mengulang atau tidak naik kelas

Kelas atau tingkat 3 : ada 2 orang siswa yang mengulang atau tidak naik kelas.

3. Siswa Baru

Umur	Jumlah
7 Tahun	0
7 - 12 Tahun	47
12 Tahun	0
Total	47

4. Siswa Lulus

Umur	Jumlah
7 Tahun	0
7 - 12 Tahun	17
12 Tahun	37
Total	54